



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik, peningkatan potensi Sumber Daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah Kabupaten Purwakarta memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan Penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 438 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah.
9. Apresiasi Inovasi Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Perangkat Daerah, ASN, yang memenuhi kriteria dan kategori kinerja di bidang inovasi daerah.
10. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

## Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Inovasi Daerah

##### Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi; dan
- f. dapat diterapkan, kompatibilitas, sesuai dengan lingkungan dan tidak melanggar sistem yang ada.

## BAB V

### GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI

#### Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah agar menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Tahun Anggaran pada pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VI

### PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian Inovasi Daerah

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap



12. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktek inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk :
  - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
  - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
  - d. diseminasi inovasi dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah;
- b. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi;
- c. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- d. Apresiasi Inovasi Daerah;
- e. Penerapan dan Penetapan Inovasi Daerah; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Inovasi Daerah

### Pasal 4

Bentuk Inovasi Daerah:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan.

- (2) Penilaian terhadap usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau apresiasi kepada Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.

#### Pasal 9

Penilaian terhadap Perangkat Daerah, ASN, Unsur Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat diterapkan pada daerah lain.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait, Akademisi dan Unsur Profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan Tim Penilai terdiri atas ketua dan anggota dengan penilai berjumlah Gasal.
- (5) Tim Penilai dibantu oleh Tim fasilitator.

#### Pasal 11

Pembentukan Tim Penilai dan Tim Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

- a. penjaringan;
- b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
- c. presentasi dan;
- d. validasi lapangan.

#### Pasal 13

- (1) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian inovasi daerah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud



pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan Pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal inovasi daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Analisis sebagaimana ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks inovasi daerah dan seleksi peserta lomba ke tahap berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Tahapan Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara pengusul inovasi daerah mempresentasikan penerapan inovasi daerahnya.
- (2) Apabila Penerapan Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah maka yang melakukan presentasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 16

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan.

#### Pasal 17

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final Tim Penilai.
- (2) Hasil sidang final Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan Informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang inovasi dan permasalahan;
  - b. tujuan dan manfaat;
  - c. waktu mulai pelaksanaan inovasi;
  - d. hasil inovasi daerah;
  - e. data indikator indeks inovasi daerah; dan
  - f. lampiran.

#### Pasal 19

- (1) Tahapan validasi melalui tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai mempunyai tugas untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk Pin/Lencana, Piagam Penghargaan dan/atau Piala.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, Pemberian Penghargaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mempertimbangkan ASN dimaksud untuk diusulkan memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa Baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
  - a. Monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
  - b. Evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan



Pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023  
BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 65